



Analisis Efektivitas Pengawasan Penggunaan Perairan Terminal Khusus Melalui Survei Fasilitas Pelabuhan Pada Ksop Kelas I Samarinda

Akbar Rusydiyanto¹, Benny Agus Setiono², Didik Purwiyanto³

^{1,2,3} Program Studi Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim, Fakultas Vokasi Pelayaran, Universitas Hang Tuah

Korespondensi penulis: akbarrusdi55@gmail.com

Abstract. *The supervision of the use of Special Terminal waters is an essential part of ensuring navigation safety, security, and compliance with port regulations. The Class I Harbormaster and Port Authority (KSOP) of Samarinda carries out supervision through port facility surveys to ensure that the use of Special Terminal waters complies with applicable regulations. This study aims to analyze the effectiveness of supervising the use of Special Terminal waters through port facility surveys, identify the obstacles encountered, and examine the efforts made to improve the effectiveness of supervision at the Class I Harbormaster and Port Authority (KSOP) of Samarinda. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, which consists of data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the supervision process has been implemented effectively through planning, administrative verification, field surveys, monitoring, and evaluation. However, several obstacles remain, including incomplete administrative documents, field conditions, coordination among stakeholders, and limited human resources. To improve the effectiveness of supervision, the Class I Harbormaster and Port Authority (KSOP) of Samarinda strengthens coordination, enhances personnel competence, optimizes the use of the MaritimHub information system, and conducts continuous monitoring and evaluation. These efforts are expected to improve the effectiveness of supervision and support safe, orderly, and compliant port operations.*

Keywords: *Supervision, Special Terminal, Water Area Utilization, Port Facility Survey, Class I Harbormaster and Port Authority (KSOP) of Samarinda.*

Abstrak. Pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus merupakan bagian penting dalam menjamin keselamatan pelayaran, keamanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan kepelabuhanan. KSOP Kelas I Samarinda melaksanakan pengawasan melalui survei fasilitas pelabuhan untuk memastikan penggunaan perairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan, kendala yang dihadapi, serta upaya peningkatan efektivitas pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus di KSOP Kelas I Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan cukup efektif melalui perencanaan, verifikasi administrasi, pelaksanaan survei, serta monitoring dan evaluasi. Kendala yang dihadapi meliputi ketidaklengkapan administrasi, kondisi lapangan, koordinasi antar pihak, serta keterbatasan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, KSOP Kelas I Samarinda melakukan penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan MaritimHub, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan upaya tersebut, pelaksanaan pengawasan diharapkan semakin efektif dalam mendukung penyelenggaraan kepelabuhanan yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan.

Kata kunci: Pengawasan, Terminal Khusus, Penggunaan Perairan, Survei Fasilitas Pelabuhan, KSOP Kelas I Samarinda.

1. LATAR BELAKANG

Perairan yang berada pada Terminal Khusus (TERSUS) di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda memerlukan pengawasan yang berkelanjutan guna menjamin keselamatan pelayaran sekaligus menjaga ketertiban dalam pemanfaatan ruang perairan. Aktivitas pengawasan tersebut diarahkan agar seluruh kegiatan operasional terminal tetap berlangsung sesuai ketentuan serta izin yang telah diberikan.

Pelaksanaannya mencakup tahapan administratif disertai verifikasi teknis melalui pelaksanaan survei lapangan. Dari hasil pengamatan penulis, survei fasilitas pelabuhan yang digunakan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan masih menemui sejumlah hambatan administratif maupun teknis. Permasalahan yang muncul meliputi ketidaksesuaian antara kondisi aktual di lapangan dengan dokumen perizinan milik perusahaan. Di samping itu, integrasi data antarsistem yang digunakan dalam proses pengawasan belum berjalan secara optimal. Penulis juga menemukan adanya kekurangan pada kelengkapan dokumen administrasi yang disampaikan oleh perusahaan. Tantangan lain terlihat pada penggunaan sistem digital seperti MaritimHub yang masih mengalami kendala teknis. Dalam upaya digitalisasi pelabuhan, sistem informasi yang belum terhubung secara maksimal berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan serta memengaruhi ketepatan data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Natasya, 2025). Selain itu, pelaksanaan survei lapangan kerap terkendala akibat miskomunikasi antara pihak KSOP dengan perusahaan terkait penjadwalan kegiatan. Padahal, koordinasi yang berjalan dengan baik menjadi faktor penting dalam mendukung efisiensi operasional pelabuhan serta kelancaran proses pengawasan (Intan et al, 2025).

Saat ini pemerintah terus mendorong transformasi digital dan peningkatan tata kelola sektor pelabuhan melalui penguatan sistem pengawasan serta digitalisasi layanan kepelabuhanan. Pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus menjadi semakin penting karena meningkatnya aktivitas industri, khususnya sektor pertambangan dan logistik, yang memanfaatkan Terminal Khusus sebagai sarana distribusi barang. Peningkatan aktivitas tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif agar pemanfaatan wilayah perairan tetap sesuai dengan ketentuan perizinan, menjamin keselamatan pelayaran, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan ruang perairan.

Ditinjau dari sisi teknis, pelaksanaan pengawasan yang diterapkan hingga saat ini masih menunjukkan pola yang parsial karena belum terhubung dalam suatu sistem yang terintegrasi. Survei lapangan, pengelolaan data administrasi, serta pemanfaatan sistem digital masih dijalankan secara terpisah sehingga proses pengawasan belum berlangsung secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penerapan pendekatan pengawasan yang lebih terstruktur dan saling terintegrasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan pelabuhan (Notteboom & Rodrigue, 2020).

Pengawasan penggunaan perairan pada Terminal Khusus menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional dan keselamatan pelayaran di lingkungan pelabuhan. Pengawasan yang tidak berjalan optimal dapat menimbulkan hambatan pada aktivitas bongkar

muat dan pergerakan kapal sehingga berpotensi menyebabkan kepadatan aktivitas pelabuhan serta meningkatkan risiko keselamatan pelayaran (Hidayat , 2020).

Terminal Khusus memiliki karakteristik operasional yang cukup kompleks karena digunakan untuk kegiatan usaha tertentu dengan intensitas penggunaan perairan yang tinggi. Aktivitas seperti sandar kapal, bongkar muat, dan penggunaan area perairan harus sesuai dengan izin yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian penggunaan perairan dengan dokumen perizinan dapat menimbulkan pelanggaran administrasi maupun risiko keselamatan pelayaran (Putri, 2025).

Dalam pelaksanaan pengawasan, survei fasilitas pelabuhan digunakan sebagai sarana untuk memverifikasi kondisi lapangan dengan data administrasi perusahaan. Survei dilakukan melalui observasi langsung, pencatatan fasilitas, dan dokumentasi penggunaan perairan. Hasil survei menjadi dasar bagi KSOP dalam mengevaluasi kesesuaian penggunaan fasilitas dan area perairan Terminal Khusus (Maharani, 2025). Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama pelaksanaan magang di KSOP Kelas I Samarinda, proses pengawasan penggunaan perairan masih menghadapi beberapa kendala. Permasalahan yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan dokumen perizinan, kelengkapan administrasi perusahaan yang belum optimal, serta kendala teknis pada sistem digital MaritimHub. Selain itu, pelaksanaan survei lapangan juga terkadang mengalami hambatan koordinasi antara pihak KSOP dan perusahaan terkait jadwal survei.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan perairan belum sepenuhnya berjalan secara terintegrasi antara aspek teknis survei lapangan, administrasi perizinan, dan sistem digital. Padahal, integrasi ketiga aspek tersebut sangat penting untuk mendukung efektivitas pengawasan pelabuhan serta ketepatan data dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian sebelumnya umumnya membahas pengawasan pelabuhan, keselamatan pelayaran, dan fasilitas pelabuhan secara terpisah. Penelitian mengenai integrasi survei fasilitas pelabuhan, administrasi, dan sistem digital dalam pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus melalui survei fasilitas pelabuhan di KSOP Kelas I Samarinda.

Penelitian mengenai efektivitas pengawasan penggunaan perairan menjadi penting karena keberhasilan pengawasan tidak hanya menentukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran, kelancaran operasional Terminal Khusus, serta kualitas pelayanan publik di bidang transportasi laut. Apabila pengawasan belum berjalan secara efektif, potensi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan perairan, keterlambatan proses

perizinan, dan kesalahan dalam pengambilan keputusan akan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengidentifikasi kondisi aktual pelaksanaan pengawasan sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh KSOP Kelas I Samarinda.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang di KSOP Kelas I Samarinda, petugas masih menemukan sejumlah permohonan survei fasilitas pelabuhan yang memerlukan verifikasi ulang karena adanya ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi di lapangan. Selain itu, masih dijumpai kendala dalam penggunaan sistem MaritimHub dan koordinasi penjadwalan survei sehingga proses pengawasan belum berjalan secara optimal.

2. KAJIAN TEORITIS

1) Teori Pelabuhan

Pelabuhan merupakan infrastruktur strategis dalam sistem transportasi laut yang berfungsi sebagai titik temu antara moda transportasi laut dan darat. Pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat kapal bersandar, tetapi juga sebagai pusat aktivitas logistik yang kompleks dan terintegrasi. Menurut Port Management and Operations, pelabuhan didefinisikan sebagai fasilitas yang menyediakan layanan bagi kapal untuk bersandar, melakukan bongkar muat, serta mendukung aktivitas logistik lainnya (Alderton, 2021). Definisi ini menegaskan bahwa pelabuhan mencakup aspek fisik, operasional, dan manajerial dalam satu sistem. Pelabuhan juga menjadi bagian penting dalam sistem transportasi multimoda yang menghubungkan berbagai jenis angkutan. Keberadaan pelabuhan sangat menentukan kelancaran arus distribusi barang. Oleh karena itu, pengelolaan pelabuhan harus dilakukan secara profesional dan terstruktur.

2) Teori Fasilitas Pelabuhan

Fasilitas pelabuhan merupakan komponen utama yang mendukung operasional pelabuhan secara keseluruhan. Fasilitas ini menjadi sarana fisik yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kapal, barang, dan penumpang. Tanpa fasilitas yang memadai, aktivitas kepelabuhanan tidak dapat berjalan dengan efektif. Secara umum, fasilitas pelabuhan dibagi menjadi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok meliputi dermaga, kolam pelabuhan, dan alur pelayaran yang langsung berkaitan dengan aktivitas kapal. Sementara itu, fasilitas penunjang mencakup gudang, lapangan penumpukan, serta sarana transportasi internal yang mendukung kelancaran distribusi barang. Pembagian ini menunjukkan bahwa setiap jenis fasilitas memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam sistem pelabuhan (Talley, 2020).

3) Terminal Khusus (TERSUS)

Terminal Khusus (TERSUS) merupakan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri oleh suatu perusahaan guna menunjang kegiatan usaha tertentu. Keberadaan TERSUS umumnya berkaitan dengan aktivitas industri seperti pertambangan, energi, dan manufaktur. Terminal ini dibangun untuk mendukung kelancaran distribusi komoditas dari dan ke lokasi produksi. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan, TERSUS berada di luar wilayah pelabuhan umum namun tetap berada dalam pengawasan otoritas pelabuhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat privat, TERSUS tetap tunduk pada regulasi pemerintah. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan pelayaran dan ketertiban penggunaan perairan. Dengan demikian, TERSUS menjadi bagian dari sistem kepelabuhanan yang tetap terintegrasi secara regulatif.

4) Penggunaan Perairan

Penggunaan perairan dalam konteks pelabuhan merujuk pada pemanfaatan ruang laut untuk mendukung berbagai kegiatan operasional kepelabuhanan. Kegiatan tersebut meliputi sandar kapal, alur pelayaran, serta aktivitas bongkar muat barang. Ruang perairan menjadi bagian penting dalam sistem pelabuhan karena berfungsi sebagai area kerja utama kapal. Pemanfaatan ruang perairan harus direncanakan secara tepat agar tidak menimbulkan gangguan operasional. Selain itu, penggunaan perairan juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan pelayaran. Konsep ini berkaitan erat dengan manajemen ruang laut (*marine spatial planning*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang perairan secara optimal, efisien, dan berkelanjutan (Ehler & Douvere, 2021).

5) Survei Fasilitas Pelabuhan

Survei fasilitas pelabuhan merupakan kegiatan pengumpulan data lapangan yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi fasilitas serta kesesuaian penggunaannya dengan dokumen perizinan. Kegiatan ini dilakukan secara langsung di lokasi pelabuhan untuk memperoleh data yang akurat dan aktual. Survei menjadi bagian penting dalam proses pengawasan karena memberikan gambaran nyata kondisi operasional. Selain itu, survei juga digunakan untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan dokumen administratif. Dalam praktiknya, kegiatan ini melibatkan observasi, pencatatan, dan dokumentasi fasilitas pelabuhan. Menurut Creswell, (2020), dalam penelitian kualitatif, observasi lapangan menjadi metode utama untuk memahami fenomena secara mendalam. Oleh karena itu, survei fasilitas pelabuhan memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan kontekstual.

6) Teori Pengawasan

Teori pengawasan (control theory) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari fungsi manajemen untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalur yang benar. Dalam konteks organisasi, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi kinerja. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis, serta tindakan perbaikan. Menurut Robbins & Coulter, (2021), pengawasan meliputi tiga tahap utama, yaitu penetapan standar, pengukuran kinerja, dan tindakan korektif. Tahapan ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan menjadi alat penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi.

7) Sistem Informasi Maritim (MaritimHub)

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi dalam sektor kepelabuhanan, termasuk penggunaan sistem seperti MaritimHub. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi pelabuhan secara lebih efisien dan terstruktur. MaritimHub digunakan dalam proses pengajuan permohonan layanan, verifikasi dokumen, hingga pengolahan data operasional. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi yang sebelumnya manual dapat dilakukan secara digital. Hal ini memungkinkan pengolahan data menjadi lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, sistem digital juga membantu dalam meningkatkan transparansi pelayanan. Dengan demikian, MaritimHub menjadi salah satu instrumen penting dalam modernisasi pengelolaan pelabuhan.

8) Dimensi Efektivitas Pengawasan Penggunaan Perairan

Dalam penelitian ini, efektivitas pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu aspek teknis, administratif, dan sistem digital. Ketiga aspek ini merupakan bagian yang saling berkaitan dalam proses pengawasan kepelabuhanan. Aspek teknis berkaitan dengan pelaksanaan survei fasilitas pelabuhan di lapangan. Aspek ini mencakup kegiatan observasi, pengukuran, serta pencatatan kondisi fasilitas dan penggunaan perairan. Dalam teori pengawasan, tahap ini merupakan bagian dari proses pengukuran kinerja, yaitu membandingkan kondisi aktual dengan standar yang telah ditetapkan (Robbins & Coulter, 2021). Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan survei sangat menentukan akurasi data dalam pengawasan.

9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa pelabuhan memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan

yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, bongkar muat barang, serta perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pelabuhan harus menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta ketertiban penggunaan perairan. Selain itu, pemerintah melalui otoritas pelabuhan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas kepelabuhanan, termasuk penggunaan perairan pada Terminal Khusus. Dengan demikian, pengawasan penggunaan perairan merupakan bagian dari implementasi fungsi pengendalian pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keteraturan operasional pelabuhan.

10) PM Tentang Terminal Khusus

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut dijelaskan bahwa Terminal Khusus (TERSUS) merupakan terminal yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokok tertentu. Regulasi ini menerangkan bahwa penyelenggaraan Terminal Khusus wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan operasional sebelum memperoleh izin pengoperasian. Selain itu, penggunaan fasilitas dan wilayah perairan pada Terminal Khusus harus berada di bawah pengawasan otoritas pelabuhan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk menjamin keselamatan pelayaran, keamanan operasional, dan ketertiban penggunaan wilayah perairan pelabuhan.

11) Regulasi KSOP

Dalam ketentuan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dijelaskan bahwa KSOP memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, pengendalian lalu lintas kapal, serta pengawasan penggunaan fasilitas dan perairan pelabuhan. KSOP juga bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen, pemeriksaan fasilitas, dan pelaksanaan survei lapangan terhadap Terminal Khusus. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional sesuai dengan izin dan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kewenangan tersebut, KSOP berperan sebagai pengawas utama dalam menjaga keteraturan dan efektivitas operasional kepelabuhanan.

12) SOP Survei Fasilitas Pelabuhan

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dijelaskan bahwa KSOP memiliki tugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalam prosedur operasional survei fasilitas pelabuhan dijelaskan bahwa kegiatan survei dilakukan

melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan dokumen administrasi, observasi lapangan, pengukuran fasilitas, dokumentasi, serta penyusunan laporan hasil survei.

13) Aturan Penggunaan Perairan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dijelaskan bahwa penggunaan wilayah perairan pelabuhan harus sesuai dengan izin dan peruntukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap pemanfaatan ruang perairan wajib memperhatikan aspek keselamatan pelayaran, kelancaran lalu lintas kapal, dan perlindungan lingkungan maritim. Selain itu, penggunaan perairan yang tidak sesuai izin dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus melalui survei fasilitas pelabuhan di KSOP Kelas I Samarinda. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini dapat mengungkap hubungan antara aspek teknis survei, administrasi, dan sistem digital dalam praktik pengawasan pelabuhan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data berupa deskripsi mendalam mengenai fenomena pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Perairan Terminal Khusus melalui Survei Fasilitas Pelabuhan di KSOP Kelas I Samarinda

a) Perencanaan Pengawasan Dilaksanakan Berdasarkan Permohonan Perusahaan dan Ketentuan Peraturan

Tabel 1. Ringkasan Temuan Perencanaan Pengawasan

Aspek yang Dikaji	Informan	Ringkasan Temuan
Penyusunan jadwal survei	Frizky Andrian Perdana, SST., Pel., MT (Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan)	Jadwal pengawasan disusun berdasarkan permohonan perusahaan, prioritas pelayanan, dan kebutuhan survei lapangan.
Persiapan administrasi	Ariq Gema Moslem, S.Tr.Pel (Petugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut)	Sebelum survei dilakukan seluruh dokumen administrasi diverifikasi terlebih dahulu.
Koordinasi awal	Anjelin Anugrahsilia (Petugas Bidang Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan)	Koordinasi dilakukan antarbidang untuk memastikan kesiapan personel, dokumen, dan peralatan survei.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa perencanaan pengawasan merupakan tahapan awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan survei fasilitas pelabuhan. Ketiga informan menjelaskan bahwa sebelum survei dilaksanakan, KSOP Kelas I Samarinda terlebih dahulu melakukan penyusunan jadwal, verifikasi administrasi, dan koordinasi antarbidang.

Berdasarkan hasil wawancara, Frizky Andrian Perdana, SST., Pel., MT. selaku Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan KSOP Kelas I Samarinda menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus diawali dengan proses perencanaan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan serta dokumen permohonan yang diajukan oleh perusahaan.

b) Verifikasi Administrasi dan Legalitas Menjadi Dasar Efektivitas Pengawasan

Tabel 2. Ringkasan Temuan Verifikasi Administrasi

Aspek yang Dikaji	Informan	Ringkasan Temuan
Kelengkapan dokumen perusahaan	Frizky Andrian Perdana, SST., Pel., MT (Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan)	Seluruh dokumen administrasi diperiksa sebelum survei lapangan dilaksanakan.
Pemeriksaan legalitas Terminal Khusus	Anjelin Anugrahsilia (Petugas Bidang Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan)	Legalitas perusahaan dan izin Terminal Khusus menjadi dasar pelaksanaan survei.
Validasi dokumen dengan kondisi lapangan	Ariq Gema Moslem, S.Tr.Pel (Petugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut)	Dokumen diverifikasi kembali ketika pelaksanaan survei berlangsung.

Berdasarkan Tabel 4.2, proses verifikasi administrasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus. Sebelum survei dilaksanakan, petugas memastikan seluruh dokumen administrasi yang menjadi persyaratan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Tahapan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan administrasi sekaligus memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa verifikasi administrasi dan legalitas telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan

pengawasan sehingga penggunaan perairan Terminal Khusus dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan sebelum dilakukan survei lapangan.

c) Pelaksanaan Survei Fasilitas Pelabuhan

Tabel 3. Ringkasan Temuan Pelaksanaan Survei

Aspek yang Dikaji	Informan	Ringkasan Temuan
Pemeriksaan fasilitas pelabuhan	Bifani Yoga Swara Asmaji, A.Md (Penilik Kepelabuhanan)	Pemeriksaan dilakukan secara langsung terhadap kondisi fasilitas Terminal Khusus.
Pengukuran dan pencatatan	Moh. Azril Ardiansyah (Penilik Kepelabuhanan)	Seluruh hasil pengukuran dicatat sebagai bahan penyusunan laporan survei.
Pendampingan perusahaan	Pak Rian (Perwakilan Perusahaan Pemilik Terminal Khusus)	Pihak perusahaan mendampingi petugas selama proses survei berlangsung.

Berdasarkan Tabel 4.3, pelaksanaan survei fasilitas pelabuhan merupakan inti dari proses pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus. Pada tahap ini petugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fasilitas, melakukan pengukuran, serta mencocokkan kondisi lapangan dengan dokumen administrasi yang telah diverifikasi sebelumnya. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara bersama antara petugas KSOP dan perwakilan perusahaan untuk memastikan proses survei berjalan secara transparan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan survei dilakukan secara sistematis dengan melibatkan tim yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Dokumentasi penelitian juga memperlihatkan adanya berita acara survei, dokumentasi lapangan, dan hasil pengukuran sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

d) Monitoring dan Evaluasi Pengawasan

Tabel 4. Ringkasan Temuan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan

Aspek yang Dikaji	Informan	Ringkasan Temuan
Penyusunan laporan hasil survei	Frizky Andrian Perdana, SST., Pel., MT (Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan)	Seluruh hasil survei disusun dalam bentuk laporan dan berita acara sebagai dasar tindak lanjut.
Evaluasi hasil pengawasan	Aniq Gema Moslem, S.Tr.Pel (Petugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut)	Hasil survei dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian fasilitas dengan ketentuan yang berlaku.
Tindak lanjut hasil survei	Bifani Yoga Swara Asmaji, A.Md (Penilik Kepelabuhanan)	Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan diberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan.
Monitoring kepatuhan	Moh. Azril Ardiansyah (Penilik Kepelabuhanan)	Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan rekomendasi telah dilaksanakan perusahaan.

Berdasarkan Tabel 4, monitoring dan evaluasi merupakan tahapan akhir dalam proses pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus melalui survei fasilitas pelabuhan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, proses monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan hasil survei, penyampaian rekomendasi kepada perusahaan, serta pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan.

2) Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Perairan Terminal Khusus melalui Survei Fasilitas Pelabuhan di KSOP Kelas I Samarinda

a) Kendala Administrasi

Tabel 6. Ringkasan Temuan Kendala Administrasi

Aspek yang Dikaji	Informan	Ringkasan Temuan
Kelengkapan dokumen perusahaan	Frizky Andrian Perdana, SST., Pel., MT	Masih terdapat perusahaan yang mengajukan permohonan dengan dokumen administrasi yang belum lengkap.
Proses verifikasi	Anjelin Anugrahsilia	Kekurangan dokumen menyebabkan proses verifikasi memerlukan waktu lebih lama.
Perbaikan dokumen	Pak Rian	Perusahaan harus melengkapi dokumen sebelum survei dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan adalah aspek administrasi. Kelengkapan dokumen menjadi persyaratan utama sebelum survei dilaksanakan. Apabila terdapat dokumen yang belum sesuai atau belum lengkap, maka proses pengawasan tidak dapat dilanjutkan sampai perusahaan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa berkas administrasi masih memerlukan perbaikan sebelum memperoleh persetujuan. Dokumentasi penelitian juga memperlihatkan adanya proses pengembalian berkas kepada perusahaan untuk dilengkapi.

b) Kendala Kondisi Lapangan

Tabel 7. Ringkasan Temuan Kendala Kondisi Lapangan

Aspek yang Dikaji	Informan	Ringkasan Temuan
Kondisi cuaca	Aniq Gema Moslem, S.Tr.Pel	Cuaca yang kurang mendukung menyebabkan jadwal survei mengalami penyesuaian.
Akses menuju lokasi	Bilani Yoga Swara Asmaji, A.Md	Beberapa Terminal Khusus berada pada lokasi yang cukup jauh sehingga membutuhkan waktu perjalanan lebih lama.
Kondisi perairan	Moh. Aznil Ardiansyah	Arus dan pasang surut perairan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan survei.

Berdasarkan Tabel 7, kondisi lapangan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan. Letak Terminal Khusus yang tersebar di berbagai wilayah perairan menyebabkan petugas harus menyesuaikan jadwal survei dengan kondisi cuaca, akses transportasi, dan karakteristik lokasi. Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan survei menyesuaikan kondisi cuaca dan tingkat keselamatan kerja di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor alam merupakan kendala yang tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalkan melalui perencanaan dan koordinasi yang baik.

c) Kendala Koordinasi Antar Instansi dan Perusahaan

Tabel 8. Ringkasan Temuan Kendala Koordinasi

Aspek yang Dikaji	Informan	Ringkasan Temuan
Koordinasi dengan perusahaan	Frizky Andrian Perdana, SST., Pel., MT	Komunikasi dengan perusahaan pada umumnya berjalan baik, namun terkadang terjadi keterlambatan penyampaian informasi mengenai jadwal survei maupun kelengkapan dokumen.
Koordinasi internal	Ariq Gema Moslem, S.Tr.Pel	Koordinasi antarpegawai telah berjalan sesuai tugas masing-masing, namun perlu penyesuaian apabila terdapat perubahan jadwal secara mendadak.
Respons perusahaan	Pak Rian	Perusahaan berupaya memenuhi permintaan data, namun proses internal perusahaan terkadang menyebabkan keterlambatan penyampaian dokumen.

Berdasarkan Tabel 8, koordinasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan pengawasan. Pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus melibatkan berbagai pihak, baik dari internal KSOP maupun perusahaan pemilik Terminal Khusus. Hasil observasi menunjukkan bahwa komunikasi antara KSOP dan perusahaan telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala administratif yang menyebabkan pelaksanaan survei harus dijadwalkan ulang.

d) Keterbatasan Sarana dan Sumber Daya

Tabel 9. Ringkasan Temuan Keterbatasan Sarana dan Sumber Daya

Aspek yang Dikaji	Informan	Ringkasan Temuan
Ketersediaan personel	Frizky Andrian Perdana, SST., Pel., MT	Jumlah personel telah mencukupi, namun peningkatan beban kerja memerlukan pengaturan jadwal yang lebih efektif.
Sarana operasional	Bifani Yoga Swara Asmaji, A.Md	Sarana operasional tersedia, tetapi pemanfaatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan survei di lapangan.
Efisiensi pelaksanaan	Moh, Azril Ardiansyah	Pengaturan waktu dan penggunaan peralatan menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas survei.

Berdasarkan Tabel 9, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dan sarana operasional turut memengaruhi pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan survei tetap dapat dilaksanakan sesuai prosedur meskipun terdapat beberapa keterbatasan fasilitas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana belum menghambat pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan, namun menjadi faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan survei fasilitas pelabuhan.

3) Upaya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Penggunaan Perairan Terminal Khusus melalui Survei Fasilitas Pelabuhan di KSOP Kelas I Samarinda

a) Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi

Tabel 11. Ringkasan Temuan Peningkatan Koordinasi

Aspek yang Dikaji	Informan	Ringkasan Temuan
Koordinasi internal	Frizky Andrian Perdana, SST., Pel., MT	Koordinasi dilakukan secara rutin sebelum dan sesudah pelaksanaan survei.
Komunikasi dengan perusahaan	Ariq Gema Moslem, S.Tr.Pel	Komunikasi dilakukan sejak tahap permohonan hingga tindak lanjut hasil survei.
Penyelesaian kendala	Pak Rian	Permasalahan diselesaikan melalui koordinasi bersama antara KSOP dan perusahaan.

Berdasarkan Tabel 11, peningkatan koordinasi merupakan salah satu upaya utama yang dilakukan KSOP Kelas I Samarinda dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Koordinasi tidak hanya dilakukan antarpegawai di lingkungan KSOP, tetapi juga melibatkan perusahaan sebagai pemilik Terminal Khusus. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, koordinasi dilakukan melalui surat resmi, komunikasi langsung, serta pertemuan koordinasi apabila diperlukan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa peningkatan koordinasi menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus.

b) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Tabel 12. Ringkasan Temuan Peningkatan Kompetensi SDM

Aspek yang Dikaji	Informan	Ringkasan Temuan
Kompetensi petugas	Frizky Andrian Perdana, SST., Pel., MT	Kompetensi petugas terus ditingkatkan melalui pembinaan dan pelatihan.
Pengalaman lapangan	Bifani Yoga Swara Asmaji, A.Md	Pengalaman survei menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan.
Pemahaman regulasi	Moh. Azril Ardiansyah	Petugas terus mengikuti perkembangan regulasi yang berkaitan dengan kepelabuhanan.

Berdasarkan Tabel 12, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu strategi yang diterapkan KSOP Kelas I Samarinda dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Hasil observasi menunjukkan bahwa petugas telah melaksanakan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi sumber daya manusia merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus.

c) Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pengawasan

Tabel 13. Ringkasan Temuan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Aspek yang Dikaji	Informan	Ringkasan Temuan
Sistem informasi kepelabuhanan	Frizky Andrian Perdana, SST., Pel., MT	Pengawasan didukung oleh sistem informasi untuk mempermudah pengelolaan data administrasi dan hasil survei.
Pengelolaan data	Anjelin Anugrahsilia	Data administrasi dan hasil survei disimpan secara sistematis sebagai arsip dan bahan evaluasi.
Efisiensi pelayanan	Ariq Gema Moslem, S.Tr.Pel	Pemanfaatan teknologi membantu mempercepat proses administrasi dan penyusunan laporan hasil survei.

Berdasarkan Tabel 13, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan KSOP Kelas I Samarinda dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus. Berdasarkan hasil wawancara, Anjelin Anugrahsilia selaku petugas Bidang Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan KSOP Kelas I Samarinda menjelaskan bahwa MaritimHub dimanfaatkan sebagai media pendukung dalam pengelolaan data dan administrasi pengawasan. Penggunaan sistem tersebut membantu mempercepat proses pengolahan data serta mempermudah pemantauan dokumen yang berkaitan dengan penggunaan perairan Terminal Khusus.

d) Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Tabel 14. Ringkasan Temuan Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Aspek yang Dikaji	Informan	Ringkasan Temuan
Monitoring berkala	Moh. Azril Ardiansyah	Monitoring dilakukan untuk memastikan perusahaan telah menindaklanjuti hasil survei.
Evaluasi internal	Frizky Andrian Perdana, SST., Pel., MT	Evaluasi internal dilakukan sebagai dasar peningkatan kualitas pengawasan.
Pembinaan kepada perusahaan	Pak Rian	Perusahaan memperoleh arahan dan pembinaan apabila ditemukan ketidaksesuaian selama survei.

Berdasarkan Tabel 14, penguatan monitoring dan evaluasi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, kegiatan monitoring dan evaluasi telah menjadi bagian dari mekanisme pengawasan di KSOP Kelas I Samarinda. Pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan perusahaan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun langkah perbaikan pada kegiatan pengawasan berikutnya.

B. Pembahasan

1) Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Perairan Terminal Khusus melalui Survei Fasilitas Pelabuhan di KSOP Kelas I Samarinda

a) Analisis Berdasarkan Teori George R. Terry

(1) Planning (Perencanaan)

Pada tahap planning, KSOP menyusun jadwal survei, melakukan pemeriksaan administrasi, dan menetapkan personel yang akan melaksanakan survei. Perencanaan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan telah dirancang secara sistematis sebelum dilaksanakan. Hasil penelitian mendukung teori Terry yang menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan tujuan, menyusun langkah kerja, serta menetapkan sumber daya yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Dalam penelitian ini, perencanaan menjadi dasar keberhasilan pelaksanaan pengawasan karena mampu meminimalkan hambatan selama kegiatan survei berlangsung.

(2) Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian terlihat dari pembagian tugas antarpegawai pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan, serta Penilik Kepelabuhanan. Setiap petugas memiliki tugas yang berbeda sesuai kompetensi dan kewenangannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi telah mendukung pelaksanaan pengawasan sehingga setiap tahapan dapat berjalan secara terkoordinasi.

(3) Actuating (Pelaksanaan)

Tahap actuating diwujudkan melalui pelaksanaan survei fasilitas pelabuhan secara langsung. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fasilitas, mengukur objek yang diperiksa, mendokumentasikan hasil survei, dan melakukan pencocokan dengan dokumen administrasi perusahaan.

(4) Controlling (Pengawasan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi controlling telah berjalan secara berkesinambungan sehingga setiap ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, teori George R. Terry terbukti relevan dalam menjelaskan proses pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus di KSOP Kelas I Samarinda.

2) Analisis Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Perairan Terminal Khusus melalui Survei Fasilitas Pelabuhan di KSOP Kelas I Samarinda

a) Analisis Berdasarkan Teori George R. Terry

(1) Planning (Perencanaan)

Dalam fungsi perencanaan, KSOP Kelas I Samarinda berupaya meningkatkan kualitas pengawasan melalui penyusunan jadwal yang lebih terencana, peningkatan koordinasi sebelum survei, serta penyempurnaan proses administrasi. Perencanaan yang baik memberikan arah

yang jelas bagi seluruh personel sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berlangsung secara efektif.

(2) Organizing (Pengorganisasian)

Pada fungsi pengorganisasian, peningkatan efektivitas dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas sesuai kompetensi masing-masing personel. Kepala Seksi, petugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, petugas Bidang Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan, serta Penilik Kepelabuhanan memiliki peran yang saling melengkapi dalam pelaksanaan survei.

(3) Actuating (Pelaksanaan)

Pada tahap pelaksanaan, peningkatan efektivitas diwujudkan melalui pengembangan kompetensi petugas, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prosedur operasional secara konsisten. Penggunaan sistem informasi membantu petugas dalam mengelola data administrasi dan menyusun laporan hasil survei secara lebih cepat dan akurat.

(4) Controlling (Pengawasan)

Fungsi controlling diwujudkan melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Setiap hasil survei dianalisis untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap rekomendasi yang diberikan. Monitoring yang dilakukan secara berkala memungkinkan KSOP segera mengidentifikasi apabila masih terdapat ketidaksesuaian sehingga tindakan korektif dapat dilakukan lebih cepat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus melalui survei fasilitas pelabuhan di KSOP Kelas I Samarinda telah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, verifikasi administrasi, pelaksanaan survei lapangan, serta monitoring dan evaluasi hasil survei. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa fungsi manajemen yang terdiri atas planning, organizing, actuating, dan controlling telah diterapkan secara terpadu sehingga mampu mendukung pelaksanaan pengawasan secara efektif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa survei fasilitas pelabuhan menjadi instrumen penting dalam memastikan kesesuaian antara kondisi fasilitas di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KSOP Kelas I Samarinda diharapkan terus meningkatkan kualitas pengawasan penggunaan perairan Terminal Khusus melalui penyempurnaan sistem koordinasi antarbidang, peningkatan kualitas verifikasi administrasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses survei fasilitas pelabuhan. Perusahaan diharapkan meningkatkan

kepatuhan terhadap ketentuan administrasi maupun teknis sebelum pelaksanaan survei. Peningkatan kompetensi petugas perlu terus dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembaruan pengetahuan mengenai regulasi kepelabuhanan serta perkembangan teknologi informasi.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik transportasi laut Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2022). Pedoman pelaksanaan survei fasilitas pelabuhan. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2023). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- George, R. T. (2019). Principles of management. Irwin Professional Publishing.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah (Edisi revisi). Bumi Aksara.
- Hidayat, A. (2022). Efektivitas pengawasan kepelabuhanan dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jasa pelabuhan. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 9(2), 115-126.
- Indrawan, R., & Yaniawati, R. P. (2021). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran (Edisi revisi). Refika Aditama.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Survei Fasilitas pada Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). Standar operasional prosedur survei fasilitas pelabuhan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. (2022). Analisis efektivitas pengawasan fasilitas kepelabuhanan pada terminal khusus. *Jurnal Transportasi Maritim Indonesia*, 6(1), 33-45.
- Prasetyo, D., & Hidayat, R. (2023). Implementasi survei fasilitas pelabuhan sebagai instrumen pengawasan terminal khusus. *Jurnal Administrasi Maritim*, 11(1), 25-37.
- Rahman, M. (2022). Pengaruh koordinasi organisasi terhadap efektivitas pengawasan di sektor kepelabuhanan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(3), 180-192.
- Salim, A. (2020). Manajemen transportasi. RajaGrafindo Persada.
- Sari, D., & Nugroho, B. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Transportasi*, 15(2), 97-110.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta).
- Suwandi, B., & Basrowi. (2020). Memahami penelitian kualitatif. Rineka Cipta.

- Terry, G. R. (2018). Principles of management. Richard D. Irwin.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. JURNAL APLIKASI PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN, 14(2).
- Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.); 5th ed.). Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. 106 Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications